



Judul : Keganjilan Pilkada: Komisi II akan evaluasi sistem kotak kosong
Tanggal : Selasa, 03 Desember 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Keganjilan Pilkada Komisi II Akan Evaluasi Sistem Kotak Kosong

ANGGOTA Komisi II DPR Ahmad Irawan menyoroti kemenangan kotak kosong di sejumlah daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan 27 November lalu. Kemenangan kotak kosong ini dinilai anomali dan tidak masuk akal.

“Menangnya kotak kosong merupakan suatu dinamika sosial politik yang harus dicermati. Seharusnya jika memang rakyat menginginkan kepemimpinan alternatif, maka gerakan tersebut telah dimulai dan harus ada sejak proses pencalonan,” ucapnya.

Irawan menegaskan, seseorang dapat dicalonkan melalui jalur perseorangan (independen) atau melalui jalur partai politik. Adanya calon perseorangan ini merupakan realitas baru dan telah menimbulkan suatu kesadaran konstitusional tentang adanya kesempatan perorangan untuk dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilkada.

“Awal dilaksanakannya Pilkada, basis pencalonan hanya melalui oleh partai politik. Namun karena dinamika sosial, terdapat tafsir baru yang memberikan hak kepada

perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” kata Irawan.

Secara konstitusional, sambungnya, harus disadari bahwa calon perseorangan pun dibebani kewajiban persyaratan jumlah minimal dukungan terhadap calon yang bersangkutan yang mau maju dalam Pilkada.

Karena partai politik juga dibebani syarat minimum dukungan kursi di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk mengajukan pasangan calon.

“Banyak daerah dan Pilkada pada tahun 2024 yang menggunakan bentuk dukungan partai politik dengan basis jumlah perolehan suara partai politik karena lebih mudah, bukan kursi di DPRD,” bilanginya.

Irawan bilang, syarat dukungan ini mutlak diperlukan agar warga negara yang maju dalam pemilihan bersungguhsungguh dalam mengikuti proses pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga nilai dan kepercayaan rakyat terhadap proses Pilkada dan demokrasi. Jika tidak, kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi akan turun. ■ KAL